



ANALYTICAL HIRARCHY PROCESS (AHP) DALAM KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Irfan¹ Leni Deli²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

²Universitas Potensi Utama

irfan@umsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the priority scale in determining poverty reduction policies in Medan City. Where the hierarchy obtained from the data analysis will determine which sectors are prioritized to be developed first, from the four defined sectors, namely the economic, social and education sectors. The quantitative approach is the basis of this research, so that data can be used using interviews conducted with the Mayor / Deputy Mayor of Medan, the SKPD of Medan City (Executive), Members of the Medan City DPRD (Legislative), and Community Leaders. A literature study was conducted in the form of information-documents in soft and hard copy form. The analysis in this research uses Analytical Hierarchy Process (AHP). The findings of the study state that the establishment of poverty reduction policies in Medan City based on hierarchy are first, the economic sector in Micro, Small and Medium Enterprises by providing business capital. Second, the education sector from the collection of educational facilities and infrastructure with teaching and learning programs. Third, the social sector by providing educational assistance in the form of school equipment assistance, working capital assistance in the form of providing business facilities, and health assistance in the form of obtaining health services. Fourth, the health sector with the establishment of Type A hospitals, the establishment of medical centers by establishing puskesmas.

Keywords : *economy, education, social, health, poverty, policy*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi umat manusia. Kemiskinan sering tidak memiliki titik simpul akhir dalam penyelesaiannya. Bahkan sebagian besar masyarakat tidak mampu untuk keluar dari kemiskinan disebabkan berbagai faktor yang melingkupinya. Dalam rilis yang dikemukakan Bank Dunia, bahwa faktor penyebab kemiskinan adalah gagalnya masyarakat dalam kepemilikan modal dan tanah, keterbatasan kebutuhan dasar berupa sarana dan prasarana, pembangunan yang tidak seimbang antara kota dan desa yang menyebabkan bias sektor, kesempatan anggota masyarakat dan tidak adanya dukungan dalam akses modal/ekonomi, terjadinya perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas yang dimiliki dan tingkat pembentukan modal pada masyarakat, kemampuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, sistem *good governance* yang rendah, keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam tidak berwawasan lingkungan. Kemiskinan selalu dipersepsikan pada aspek ekonomi, yaitu berhubungan dengan pendapatan yang dimiliki seseorang.

Namun kemiskinan juga dapat dipersepsikan sebagai bentuk kekurangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan, kenderaan dan sebagainya, dimana sebagai faktor esensial yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Bahkan kemiskinan merupakan bentuk dari ketidakmampuan seorang individu dalam memenuhi kebutuhan primer untuk dapat bertahan hidup, atau mendapatkan hidup layak, seperti, makan, pakaian, tempat tinggal, akses kesehatan dan pendidikan. Namun secara umum bahwa kemiskinan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan adalah ketidakadilan sosial khususnya dalam masalah distribusi kekayaan antara kaya dan miskin, sehingga terjadi marginalisasi terhadap masyarakat miskin yang terus bertambah/berkembangan dan tetap eksis dalam jangka panjang yang mungkin tidak memiliki titik akhir.



Dalam pandangan *United Nations Development Programme* (UNDP) memberikan sebuah definisi sebagai sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berlindung, ketidakmampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, serta tidak ada keterwakilan dan kebebasan. Kemiskinan berkonotasi material. Istilah ini sering dirujuk pada seseorang atau sekelompok manusia yang kekurangan secara materi (Latif, 2007). Murdiansyah (2014) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Masyarakat miskin sangat lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi. Dalam konteks demikian, kemiskinan dengan demikian erat kaitannya dengan kapasitas dan jumlah penduduk dalam suatu daerah itu sendiri.

Sementara itu dalam pandangan Maipita (2013) bahwa Kemiskinan jika dilihat dari standar kebutuhan hidup layak, maka terjadinya kemiskinan disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar. Dimana seseorang atau sebuah rumah tangga dalam satu keluarga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sesuai standar hidup layak, sehingga disebut sebagai kemiskinan absolut. Sementara disisi lain terdapat juga kemiskinan menurut tingkat pendapat, yaitu kemiskinan yang terjadi disbbkan kurangnya pendapatan yang dimiliki seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup layak. Berbagai masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat tentu memerlukan kebijakan yang terstruktur dan sistematis. Dalam hal ini pemerintah harus dapat memberikan solusi dalam bentuk kebijakan baik dalam tataran konseptual dan implementasi. Pada saat ini kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 5 langkah, yaitu: *pertama*, meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi inklusif, baik dalam tataran makro dan mikro. Pada tataran ekonomi makro, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mengembangkan infra-struktur wilayah tertinggal. Sedangkan dalam tataran mikron, bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat. Adapun bagi masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha, serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan keberantaraan. *Kedua*, dalam menekan jumlah kemiskinan, dimana pemerintah akan memantapkan kelompok menengah ke bawah juga melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor terus dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan penguatan perekonomian Inspired middle Income class diwujudkan melalui kemudahan izin usaha bagi pemula, penguatan usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan koperasi, serta peningkatan keahlian tenaga kerja dan sertifikasi keahlian. Ketiga, melakukan reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan sejak 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, kesinambungan fiskal dan diversifikasi energi. Keempat, peningkatan anggaran perlindungan sosial. Pada periode 2010 hingga 2018, penurunan subsidi yang signifikan, dari 3,4 persen menjadi 0,8 persen PDB pada periode 2015 dan 2018 dialokasikan untuk



perlindungan sosial melalui premi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin serta perluasan program bantuan sosial. Pada 2018, anggaran yang cukup besar akan dialokasikan untuk infrastruktur dan investasi ekonomi. Kelima, melakukan penguatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui realisasi peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat, mengingat implementasinya sering tidak sesuai dengan kebijakan pusat. Selanjutnya pemerintah mendorong konsumsi masyarakat dengan menjaga inflasi terutama dari tekanan sisi suplai melalui pengurangan hambatan arus distribusi antarwilayah dan antar pulau, mengefektifkan TPID, serta mendorong penyediaan produksi pangan dan bahan pokok lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Medan (Badan Pusat Statistik, 2019) dimana jumlah penduduk miskin di Kota Medan mencapai 183.790 jiwa dari jumlah penduduk 2,7 juta jiwa. Masih besarnya jumlah penduduk miskin di Kota Medan tentu membutuhkan perhatian dari pemerintah kota, melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan dampak dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat/ tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Sebab Kota Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara tentu memiliki peran sentral dalam sektor pembangunan dari segala aspeknya. Walaupun berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Medan selama ini dalam penanggulangan kemiskinan, namun dampak dari kebijakan tersebut belum dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat miskin masih terus mengalami fluktuasi selama rentang 10 tahun terakhir.

Berdasarkan temuan awal dari kemiskinan yang dihadapi masyarakat Kota Medan, diantaranya adalah, akses permodalan dalam pengembangan usaha masyarakat masih terbatas, kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi peningkatan pendidikan masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Program bantuan yang diberikan pemerintah daerah sering tidak tepat sasaran bahkan menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat. Secara umum permasalahan kemiskinan masyarakat di Kota Medan pada dasarnya merupakan suatu dilema bagi pemerintah Kota Medan, disebabkan tumpang tindihnya dalam pengambilan dan pengimplementasian kebijakan. Secara substansial, kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Medan pada dasarnya cukup baik yang disusun melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Namun realisasi Perda tersebut tentu belum menyentuh secara esensial dalam memecahkan kemiskinan di Kota Medan secara komprehensif.

Maka kondisi dari kemiskinan yang terjadi di Kota Medan perlu disusun kebijakan baru yang memiliki cakupan luas dan komprehensif, bukan hanya pada aspek materi dan non materi. Sehingga kebijakan kemiskinan tidak hanya sebagai live service, dalam tatanan wacanan dan adanya implementasinya yang menyeluruh menysasar bagi masyarakat Kota Medan secara keseluruhan.

Kajian Teori

Kemiskinan pada dasarnya memiliki konsep berbeda dalam penilaiannya. Dalam pandangan World Bank, bahwa kemiskinan diukur dengan menggunakan ukuran kemampuan/ daya beli seseorang, yaitu US \$1 atau US \$2 per kapita per hari. Sedangkan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan (*poverty line*). Nilai dari garis kemiskinan yang digunakan adalah untuk menentukan kemiskinan dengan mengacu pada kebutuhan minimum yang dibutuhkan seseorang yaitu 21,00 kalori per kapita per hari, serta ditambah dengan kebutuhan minimum non-makan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, meliputi: papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasarinya. Adapun BIIS, mendefinisikan kemiskinan adalah seseorang/ individu yang pengeluarannya lebih rendah dari Garis Kemiskinan, maka



seseorang/ individu diklasifikasi sebagai miskin. Sedangkan kemiskinan menurut Bappenas adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki dan perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penunahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Anto, 2007).

Dalam pandangan Hamzah (2012) bahwa kemiskinan dapat dijelaskan sebagai kurangnya pemilikan materi atau ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu dalam arti yang lebih luas kemiskinan dapat meliputi ketidakcukupan yang lain seperti: rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesempatan kerja dan berusaha, keterbatasan akses terhadap berbagai hal, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan (Jacobus, dkk., 2018). Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya (Menteri Negara Kependudukan/BKKBN)

Sementara Nasikun (Suryawati, 2005) mengemukakan bahwa dalam arti proper kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multiface atau multidimensional. Sementara Sumedi dan Supadi (Annur, 2013) mengemukakan bahwa masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri, yaitu: *pertama*, tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka; *kedua*, tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada; *ketiga*, rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan; *keempat*, terperangkap dalam rendahnya budaya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme; dan *kelima*, rendahnya pemilikan aset fisik termasuk asset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan. Dalam pandangan (Arsyad, 2010) kemiskinan dapat dipilah menjadi dua aspek, yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara aspek sekunder berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.

Secara mendasar bahwa persepektif kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu: *pertama*, dari sudut pandang pengukuran, dimana kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. *Kedua* dari sudut pandang penyebab, kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan alamiah dan struktural (Nurwati, 2008). Klasifikasi dan jenis-jenis kemiskinan dalam masyarakat pada umumnya adalah; *pertama*, *kemiskinan absolute*, yaitu keadaan yang mana pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk membeli keperluan minimum; *kedua*, *kemiskinan relative*, yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu kebutuhan dengan tingkat pendapatan lainnya; *ketiga*, *kemiskinan struktural* yaitu kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan; *keempat*, *kemiskinan kultural* yaitu budaya yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi kemiskinan sebagai adanya budaya miskin (Noor, 2017). Pembagian kemiskinan juga dikemukakan Nasikun (Suryawati, 2005) dalam empat bentuk, yaitu: *pertama*, *kemiskinan absolut*, dimana ditetapkan jika pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja; *kedua*, *kemiskinan relatif*, jika



kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; *ketiga, kemiskinan kultural* jika mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar; dan *keempat, kemiskinan struktural*, jika situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Bahkan secara spesifik Sumodiningrat (1999) memberikan klasifikasi kemiskinan dalam 5 (lima) kelas, yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan structural, kemiskinan kronis, dan kemiskinan sementara. Berhubungan dengan *kemiskinan absolut* selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak, juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan. Sekelompok orang dalam masyarakat dikatakan mengalami kemiskinan relatif apabila pendapatannya lebih rendah dibandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak. Kemiskinan struktural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Kemiskinan kronis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian (daerah-daerah yang kritis akan sumberdaya alam dan daerah terpencil), rendahnya derajat pendidikan dan perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar. Sedangkan Kemiskinan sementara terjadi akibat adanya: Perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, Perubahan yang bersifat musiman, dan Bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Dalam menghadapi kemiskinan yang dihadapi masyarakat, maka usaha penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun dan mengimplementasikan berbagai kebijakan positif dan produktif. Sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat dihilangkan minimal, berkurang secara signifikan. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah diantaranya adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010, Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010, Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan. peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah tentu diharapkan dapat memberikan solusi dan pemecahan terhadap kemiskinan.

Dalam pandangan Bappenas bahwa kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan adalah mengarahkan pembangunan sektoral dan regional untuk mengatasi kemiskinan. Dalam kaitan ini, berbagai kebijaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dalam PJP I dilanjutkan serta ditingkatkan. Di samping itu, diluncurkan pula program khusus penanggulangan kemiskinan dengan mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian penduduk miskin untuk bersama-sama melepaskan diri dari kemiskinan dalam kelompok-



kelompok swadaya dengan semangat kooperatif yang dikembangkan di kalangan dan oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut sifatnya, kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dibedakan dalam tiga kelompok. *Pertama*, kebijaksanaan yang bersifat tidak langsung mengarah pada sasaran terwujudnya suasana yang mendukung keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan misalnya stabilitas ekonomi, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu kebijakan sektoral dalam bidang pertanian, industri, dan di berbagai sektor prasarana akan berpengaruh pula pada upaya penanggulangan kemiskinan. Di sektor pertanian misalnya, tercapainya swasembada pangan sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup petani, sementara pembangunan prasarana memungkinkan penduduk miskin lebih mudah memasarkan hasil produksinya sehingga pada gilirannya pendapatannya juga meningkat; *Kedua*, kebijaksanaan bersifat langsung yang ditujukan kepada kelompok penduduk miskin yang terbatas kemampuannya dan diarahkan pada peningkatan penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Pendekatan yang paling tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat dan penduduk miskin adalah melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama atau dalam wadah koperasi. Agar upaya-upaya tersebut menghasilkan nilai tambah, harus ada perbaikan akses penduduk miskin terhadap empat hal, yaitu: (1) akses terhadap sumber daya; (2) akses terhadap teknologi, berupa cara dan alat yang lebih baik dan lebih efisien; (3) akses terhadap pasar sehingga setiap produk dapat dijual untuk mendapatkan nilai tambah; dan (4) akses terhadap sumber pembiayaan; dan *Ketiga*, kebijaksanaan khusus yang diutamakan pada peningkatan keswadayaan dan penyiapan penduduk miskin agar dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi dengan penyediaan modal kerja dan pendampingan sesuai budaya setempat. Upaya khusus pada dasarnya adalah upaya untuk memberdayakan penduduk miskin dengan mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan subsistem menjadi kehidupan ekonomi yang berorientasi pasar. Satu unsur penting kebijaksanaan khusus adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap kegiatan usaha penduduk miskin berupa jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses, serta pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga yang memberi layanan kepada penduduk miskin (Bappenas, 2019). Maka untuk itu yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana gambaran dalam menetapkan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan.

Dasgupta (Ariyani, 2015) memberikan suatu desain dalam program penanggulangan kemiskinan yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini: (1) spesifik, artinya suatu program tidak cocok untuk segala situasi dan harus sesuai dengan institusi lokal, (2) relevan dengan permasalahan, (3) didasari oleh kesadaran bahwa kemiskinan adalah suatu situasi sebab akibat, tidak berdiri sendiri, (4) memahami konsekuensi yang tidak diinginkan, dan (5) berbasis sumber daya lokal. Melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikemukakan di atas khususnya Bappenas maka perlu memiliki suatu perencanaan, penetapan kebijakan dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganannya dan didukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin (Ginjar, *dkk.*, 2018). Bahkan dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan diperlukan sebuah kajian yang lengkap sebagai acuan perancangan kebijakan dan program anti kemiskinan, dan hampir semua pendekatan yang mengkaji masalah kemiskinan bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neo klasik dan model yang berpusat pada produksi (Suharto, 2003).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan analisis kuantitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara terstruktur kepada pemangku kepentingan dalam hal ini



adalah Walikota/Wakil Walikota Medan, SKPD Kota Medan (Eksekutif), Anggota DPRD Kota Medan (Legislatif), dan Tokoh Masyarakat. Dalam melengkapi data dalam penelitian ini juga dilakukan studi literatur berupa dokumen-dokumen lainnya seperti Peraturan Daerah, UU, Peraturan Pemerintah dan sebagainya yang diperoleh dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*. Sementara itu analisis dalam penelitian ini menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yaitu suatu bentuk analisis untuk menetapkan skala prioritas dalam penentuan kebijakan untuk diterapkan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.

HASIL ANALISIS

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka terdapat berbagai alternatif yang dapat dijadikan sebagai skala prioritas dalam menetapkan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Dimana terdapat empat alternatif yang perlu untuk menjadi perhatian dan bahkan dapat dikembangkan bagi pemerintah Kota Medan dalam hal ini pemangku kebijakan. Pertama, Sektor Ekonomi, skala prioritas yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kedua, Sektor Sosial, skala prioritas yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah pada bantuan pendidikan, modal kerja, dan kesehatan. Ketiga, Sektor Kesehatan, skala prioritas yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah pendirian rumah sakit dan balai-balai pengobatan. Keempat, Sektor Pendidikan, skala prioritas yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dalam optimalisasi dalam kegiatan pendidikan.

Berdasarkan skala prioritas dari keempat sektor yang dikemukakan di atas, maka dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Skala Prioritas Dalam Penetapan Kebijakan Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Alternatif Kebijakan
1	Sektor Ekonomi	Pengembangan UMKM
2	Sektor Sosial	Bantuan Pendidikan Bantuan Modal kerja Bantuan Kesehatan.
3	Sektor Kesehatan	Pendirian Rumah Sakit Balai-Balai Pengobatan
4	Sektor Pendidikan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 1 di atas maka dapat disusun mengenai sasaran kebijakan yang menjadi prioritas dalam alternatif pengambilan kebijakan pada keempat sektor tersebut. Berdasarkan tabel 2 di atas, maka prioritas kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Medan yang lebih prioritas dilakukan adalah pada sektor ekonomi berupa pengembangan UMKM dengan nilai 0,632, disusul sektor pendidikan berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan nilai 0,537; sektor sosial berupa bantuan pendidikan, modal kerja, dan kesehatan dengan nilai 0,451, serta terakhir adalah sektor kesehatan berupa pendirian rumah sakit dan balai-balai pengobatan dengan nilai 0,422.

Tabel 2: Tabulasi Hirarki Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Sektor	Kebijakan	Nilai	Prioritas
Sektor	Pengembangan	0,632	1



Ekonomi	UMKM		
Sektor Sosial	Bantuan Pendidikan Bantuan Modal kerja Bantuan Kesehatan.	0,451	3
Sektor Kesehatan	Pendirian Rumah Sakit Balai-Balai Pengobatan	0,422	4
Sektor Pendidikan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	0,537	2

Sumber: Data diolah, 2019.

Tabel 3: Tabulasi Pilihan Sasaran Sektor Ekonomi Dalam Hirarki Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan

Pilihan Sasaran Sub Sektor Ekonomi	Nilai	Prioritas
Pemberian Pelatihan	0,362	3
Pemberian Modal Usaha	0,419	1
Ketersediaan Sarana dan Prasarana	0,351	4
Kemudahan Akses Perbankan	0,402	2

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 3 di atas untuk sektor ekonomi dimana pengembangan UMKM berdasarkan sub sasaran yang menjadi prioritas untuk penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah berhubungan dengan pemberian modal usaha dengan nilai 0,419, selanjutnya kemudahan akses perbankan dengan nilai 0,402, pemberian pelatihan dengan nilai 0,362 dan terakhir ketersediaan sarana dan prasarana dengan nilai 0,351.

Tabel 4: Tabulasi Pilihan Sasaran Sektor Pendidikan Dalam Hirarki Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan

Pilihan Sasaran Sub Sektor Pendidikan	Nilai	Prioritas
Pembangunan Unit Sekolah	0,215	2
Ketersediaan Fasilitas Belajar Mengajar	0,267	1
Kemudahan Akses ke sekolah	0,149	3

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 4 untuk sektor ekonomi dimana ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan sub sasaran yang menjadi prioritas untuk penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah penyediaan fasilitas belajar mengajar dengan nilai 0,267, selanjutnya



pembangunan unit sekolah dengan nilai 0,215, dan terakhir kemudahan akses ke sekolah dengan nilai 0,149.

Tabel 5: Tabulasi Pilihan Sasaran Sektor Sosial Dalam Hirarki Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan

Pilihan Sasaran Sub Sektor Pendidikan	Pilihan Sasaran	Nilai	Prioritas
Bantuan Pendidikan	Pemberian bantuan peralatan sekolah	0,409	1
	Pemberian bantuan biaya sekolah	0,317	3
	Pemberian bantuan buku pelajaran	0,338	2
Bantuan Modal Kerja	Pemberian bantuan peralatan usaha	0,221	2
	Pemberian fasilitas tempat usaha	0,239	1
Bantuan Kesehatan	Kemudahan dalam mendapat pelayanan kesehatan	0,383	1
	Ketersediaan tempat/fasilitas kesehatan	0,371	2
	Ketersediaan jumlah tenaga medis (dokter dan perawat)	0,285	3

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan tabel 5 di atas untuk sektor sosial dimana berhubungan dengan bantuan pendidikan berdasarkan sub sasaran yang menjadi prioritas untuk penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah pemberian bantuan peralatan sekolah dengan nilai 0,409, selanjutnya pemberian bantuan buku pelajaran dengan nilai 0,338, dan terakhir pemberian bantuan biaya sekolah dengan nilai 0,317.

Adapun berhubungan dengan bantuan modal kerja berdasarkan sub sasaran yang menjadi prioritas untuk penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah pemberian fasilitas tempat usaha dengan nilai 0,239, disusul pemberian bantuan peralatan usaha dengan nilai 0,221. Sedangkan berhubungan dengan bantuan kesehatan berdasarkan sub sasaran yang menjadi prioritas untuk penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah kemudahan dalam mendapat pelayanan kesehatan dengan nilai 0,383, selanjutnya ketersediaan tempat/fasilitas kesehatan dengan nilai 0,371, dan terakhir ketersediaan jumlah tenaga medis (dokter dan perawat) dengan nilai 0,285.

Berdasarkan tabel 6 di atas untuk sektor kesehatan dimana pendirian rumah sakit berdasarkan sub sasaran yang menjadi prioritas untuk penetapan kebijakan penanggulangan



kemiskinan adalah pendirian rumah sakit Tipe A dengan nilai 0,451, disusun dengan pendirian rumah sakit Tipe B dengan nilai 0,271 serta pendirian rumah sakit Tipe C dengan nilai 0,269. Sedangkan mengenai balai pengobatan berdasarkan sub sasaran yang menjadi prioritas untuk penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah pendirian puskesmas dengan nilai 0,214, disusul pendirian klinik kesehatan dengan nilai 0,198 serta pendirian praktek dokter dengan nilai 0,173.

Tabel 6: Tabulasi Pilihan Sasaran Sektor Kesehatan Dalam Hirarki Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan

Pilihan Sasaran Sub Sektor Kesehatan	Pilihan Sasaran	Nilai	Prioritas
Pendirian Rumah Sakit	Pendirian Rumah Sakit Tipe A	0,451	2
	Pendirian Rumah Sakit Tipe B	0,271	1
	Pendirian Rumah Sakit Tipe C	0,269	3
Balai Pengobatan	Pendirian Klinik Kesehatan	0,198	2
	Pendirian Puskesmas	0,214	1
	Pendirian Praktek Dokter	0,173	3

PEMBAHASAN

Dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan tentu pemerintah harus memiliki suatu master plan dalam menetapkan skala prioritas sebagai dasar dalam memutuskan sektor yang memiliki prospek dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. sebab kemiskinan merupakan suatu masalah yang memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, karena berhubungan dengan berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Untuk itu maka diperlukan penyelesaian secara sistematis dan terstruktur dalam lingkup holistik atau komprehensif.

Dalam penanggulangan kemiskinan pada penelitian ini dimana terdapat 4 sektor yang menjadi pertimbangan untuk dijadikan sebagai ukuran. Namun berdasarkan hasil analisis data bahwa skala prioritas sektor yang perlu dikembangkan berdasarkan urutan hirarki adalah *pertama*, sektor ekonomi (UMKM); *kedua*, sektor pendidikan (ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan); *ketiga*, sektor sosial (bantuan pendidikan, modal kerja, dan kesehatan); dan *keempat*, sektor kesehatan (pendirian rumah sakit dan balai-balai pengobatan). Ketentuan sektor yang menjadi prioritas ini tentu dapat dijadikan pemerintah Kota Medan dalam penanggulangan kemiskinan yang perlu diprioritaskan untuk dikembangkan atau diambil kebijakan adalah pada sektor ekonomi khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, disusul sektor pendidikan, sektor sosial dan sektor kesehatan.

Khususnya hirarki dari prioritas dalam penanggulangan kemiskinan pada sektor ekonomi pada UMKM sesuai dengan penelitian yang dilakukan Alawiyah (2016) yang menemukan bahwa melalui pengimplementasian dari program percepatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, berupa pemberian pelatihan-pelatihan, memberikan modal kerja pada Usaha Kecil Menengah (UKM) serta penyediaan tenaga ahli sebagai pengajar, telah dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Samarinda. Sementara itu dalam temuan penelitian yang dilakukan Mahaeni, A., *dkk.* (2014) bahwa pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin di provinsi Bali memiliki manfaat positif dalam pengentasan kemiskinan. Dalam hasil analisis bantuan sosial yang menjadi skala prioritas untuk diberikan untuk pendidikan adalah pemberian bantuan peralatan



sekolah, adapun bantuan modal kerja adalah pemberian fasilitas tempat usaha, sedangkan bantuan kesehatan adalah kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan

Dalam mengoptimalkan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan, maka struktur yang menjadi skala prioritas untuk dilakukan berdasarkan hirarki dalam pengambilan keputusan adalah: *Pertama*, sektor ekonomi melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan sub sasaran pemberian modal usaha. *Kedua*, sektor pendidikan melalui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan sub sasaran ketersediaan fasilitas belajar mengajar. *Ketiga*, sektor sosial melalui bantuan pendidikan dengan sub sasaran pemberian bantuan peralatan sekolah, bantuan modal kerja dengan sub sasaran pemberian fasilitas tempat usaha, dan bantuan kesehatan dengan sub sasaran kemudahan dalam mendapat pelayanan kesehatan. Keempat, sektor kesehatan melalui pendirian rumah sakit dengan sub sasaran pendirian rumah sakit Tipe A, sedangkan pendirian balai pengobatan dengan sub sasaran pendirian puskesmas.

KESIMPULAN

Penetapan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan perlu memperhatikan berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan. Pada sektor ekonomi yang perlu menjadi skala prioritas untuk dikembangkan adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan cara pemberian modal usaha. Adapun pada sektor pendidikan dilakukan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara penyediaan ketersediaan fasilitas belajar mengajar. Sedangkan pada sektor sosial dapat dilakukan dengan pemberian bantuan pendidikan dalam bentuk bantuan peralatan sekolah, untuk bantuan modal kerja dalam bentuk pemberian fasilitas tempat usaha, dan untuk bantuan kesehatan dalam bentuk kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada sektor kesehatan dapat dilakukan dengan pendirian rumah sakit dengan Tipe A, sedangkan untuk pendirian balai pengobatan dengan mendirikan puskesmas.

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas maka rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai usulan dalam menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan adalah: *Pertama*, melakukan koordinasi secara terstruktur dan sistematis antara pemangku kebijakan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif serta melibatkan komponen masyarakat khususnya tokoh/pemuka masyarakat. *Kedua*, dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga skala prioritas kebijakan yang diambil dapat dilakukan secara hirarki, dimana pada penelitian ini kebijakan yang pertama dilakukan adalah dengan pengembangan sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor sosial dan terakhir sektor kesehatan. *Ketiga*, melakukan kerjasama diantara pemerintah daerah baik dalam lingkup satu provinsi maupu antara provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anto, Erutan Agas Punu (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebiasaan Anti Kemiskinan di Indonesia. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 10, No. 3, Maret 2007
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- AsiahHamzah (2015). Policy Tackling The Poorness and Hunger In Indonesia : Reality and Study. Jurnal AKK, Vol 1 No 1, September 2012, hal 1-55



- Alawiyah, R. (2016). Implementasi Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. *Journal Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 4.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kota Medan Dalam Angka 2019*. Medan: BPS Kota Medan.
- Bappenas (2019). Penanggulangan Kemiskinan, https://www.bappenas.go.id/files/3313/5763/1714/bab-04-pj-1998-cek_20090203095346__1781__4.doc PENANGGULANGAN KEMISKINAN, dikutip, 21 April 2019.
- Chriswardani Suryawati (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK* Vol. 8, No. 3.
- Chriswardani Suryawati (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK* Vol. 8, No. 3.
- Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen, Een N. Walewangko (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 19, No.7.
- Ginanjar, Rah Adi Fahmi; Setyadi, Sugeng; dan Suiroh, Umayatu (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol. 8, No. 2
- Latif, Hilmam (2007). Kemiskinan dan Kederewanan Memaknai Idiologi Kesejahteraan. *Maarif Jurnal*, Vol. 2, No. 1.
- Maipita, Indra, 2013, *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*, Cetakan I, Penerbit Absolute Media, Yogyakarta
- Murdiansyah, Isnan (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang). *Jurnal WIGA* Vol. 4 No. 1, Maret 2014
- Mahaeni, A., Sudibia, I. K., Wirathi, I. (2014). Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Piramida*, Vol. X, No. 1, hlm. 8-18.
- Nafiah Ariyani; Akhmad Fauzi; Bambang Juanda; dan Irfan Syauqi Beik (2015). Evaluation of Poverty Alleviation Programs Using The Rappoverty Method. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 2, 181 – 197.
- Noor, Munawar (2017). Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia (Studi Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kota Semarang). *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*
- Nurwati, Nunung (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No. 1, Januari 2008 : 1 - 11
- Purba, R. B. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 152-164.
- Reza Attabiurrobbi Annur (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal* 2 (4) (2013)
- Saaty, T.L. (2001). *Decision Making for Leaders. The Analytic Hierarchy Process for Decisions in a Complex World*.
- Suharto, Edi (2019) Paradigma Baru Studi Kemiskinan. <https://www.scribd.com/doc/310383932/Paradigma-Baru-Studi-Kemiskinan>. dikutip, 12 Maret 2019
- Sumodiningrat, G. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: IMPAC